

Alasan Amerika Serikat Mundur Dari *Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty* (INF Treaty) Tahun 2019

Miftachul Jannah¹, Aisyah², Yuniarti³

¹ Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (jmifta1997@gmail.com)

² Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

ABSTRACT

On August 2, 2019, the United States officially withdrew from the INF Treaty. The United States' decision was announced in a press release by the Ministry of Foreign Affairs. This study aims to explain the reasons for the withdrawal of the United States. As an analytical tool, this study uses the Decision Making Process Theory by William D. Coplin where the results of the research shows that US decisions are influenced by internal and external factors. Internal factors include Donald Trump's America First Policy, and the domination of the Republican Party in the Congress which has led to an increase of United States military budget while external factors are based on Russia's offence of 9M729 missile possess and threats of China's military capability enhancement which is not parties to the INF Treaty.

Keywords: *United States, Withdrawal, INF Treaty*

ABSTRAK

Pada 2 Agustus 2019, Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Perjanjian INF. Keputusan Amerika Serikat diumumkan dalam siaran pers oleh Kementerian Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan penarikan diri Amerika Serikat dari INF Treaty tersebut. Sebagai alat analisis, penelitian ini menggunakan Teori Proses Pengambilan Keputusan oleh William D. Coplin dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan AS dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan *America First* Donald Trump, dan dominasi Partai Republik di Kongres yang menyebabkan peningkatan anggaran militer Amerika Serikat, sedangkan faktor eksternal didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan Rusia melalui kepemilikan rudal 9M729 serta ancaman peningkatan kemampuan militer Tiongkok yang bukan pihak dalam Perjanjian INF.

Kata kunci: *Amerika Serikat, Penarikan diri, Traktat INF*

PENDAHULUAN

Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet pernah melakukan uji coba rudal berjenis *Intermediate Range Ballistic Missiles* (IRBM) dengan kode SS-20 Saber atau RSD-10. Uji coba dilakukan beberapa kali sejak 21 September 1975 hingga 9 Januari 1976 di Kapustin Yar, Astrakhan Oblast. Perangkat rudal tersebut memiliki jangkauan sejauh 4700 sampai 5000 kilometer dengan daya ledak sebesar 150 kiloton (CSIS, 2021), sehingga dapat mencapai negara-negara Eropa Barat. Sistem rudal SS-20 dikerahkan di Pegunungan Ural yang membentang sepanjang 2.500 di Rusia Barat dari pantai Samudra Arktik hingga barat laut Kazakhstan. Pegunungan Ural juga merupakan pemisah antara Eropa dengan Asia. Jika SS-20 dikerahkan di barat Pegunungan Ural maka akan mencapai Eropa Barat, Afrika Utara dan Timur Tengah. Jika dikerahkan di timur Pegunungan Ural, maka akan mencapai Tiongkok, Jepang, Asia Tenggara dan beberapa wilayah Amerika Serikat yaitu Hawaii dan Alaska (Kraemer, 2015: 241).

Sejak 11 Maret 1976 rudal SS-20 mulai beroperasi di Uni Soviet seperti di Pegunungan Ural, Teykovo dan Pavshyno (Nuclear Forces Guide, 2019). Hal ini selanjutnya memicu kekhawatiran negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) karena keberadaan SS-20 mengganggu keseimbangan senjata antara Eropa Timur dengan Eropa Barat. NATO merespon dengan mengeluarkan *Double Track Decisions* (DTD) pada 12 Desember 1979. Kebijakan pertama yaitu melakukan negosiasi dengan Uni Soviet untuk memusnahkan rudal SS-20. Negosiasi dilakukan secara bilateral antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dengan tujuan menciptakan keseimbangan kekuatan antara kedua negara. Kebijakan kedua yaitu

menempatkan 108 rudal balistik Pershing II dan 464 Gryphon BGM-109 *Ground Launched Cruise Missile* (GLCM) milik Amerika Serikat di Eropa Barat (McCausland, 1983). Kebijakan kedua ini baru akan dilaksanakan jika tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi antara kedua negara.

Negosiasi DTD diadakan pada 30 November 1981 di Jenewa, Swiss. Dalam negosiasi itu Amerika Serikat mengusulkan proposal *zero-option* yaitu pembatalan penempatan Pershing II dan Gryphon BGM-109 di Eropa jika Uni Soviet setuju untuk memusnahkan rudal SS-20 dan rudal sebelumnya yaitu SS-4 dan SS-5. Proposal tersebut ditolak oleh Uni Soviet karena dinilai lebih menguntungkan Amerika Serikat. Uni Soviet dituntut untuk memusnahkan seluruh rudal yang dimilikinya sedangkan Amerika Serikat hanya membatalkan penempatan rudalnya di Eropa. Dengan tidak tercapainya persetujuan dalam negosiasi, maka pada tahun 1983 Amerika Serikat mengerahkan rudal Pershing II dan Gryphon BGM-109 di Eropa (Air and Space Forces, 2013).

Amerika Serikat dan Uni Soviet kembali memulai negosiasi pada tahun 1985 ketika meningkatnya jumlah rudal balistik Amerika Serikat di Eropa Barat. Uni Soviet menawarkan rencana untuk menyeimbangkan kemampuan rudal SS-20 dan rudal Amerika Serikat di Eropa. Setelah melakukan beberapa pertemuan dan negosiasi selama kurun waktu dua tahun, pada 8 Desember 1987 Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya menandatangani *Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty* (INF Treaty) yang bertujuan menyeimbangkan kekuatan rudal yang berada di Uni Soviet dan Eropa Barat (Bohlen et.al, 2012).

Ketentuan dalam INF Treaty mengharuskan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mengeliminasi, tidak

memproduksi dan tidak melakukan uji coba terhadap rudal balistik, nuklir dan peluncur darat yang memiliki jangkauan 500–5.500 kilometer. Perjanjian tersebut diratifikasi pada 27 Mei 1988 dan mulai berlaku pada 1 Juni 1988. Sejak tiga tahun berlakunya INF Treaty tepatnya pada 1 Juni 1991, Uni Soviet telah mengeliminasi sebanyak 1.846 rudal balistik. Di pihak lain Amerika Serikat berhasil mengeliminasi sebanyak 846 rudal balistik. Selama proses eliminasi, kedua pihak mengirimkan tim untuk mengawasi proses eliminasi satu dengan lainnya (Harahan, 1993).

Setelah Uni Soviet bubar, kewajiban INF Treaty untuk proses eliminasi rudal yang belum terselesaikan dan menjalankan perjanjian diteruskan oleh semua negara pecahan Uni Soviet, salah satunya Rusia. INF Treaty dinilai berhasil dalam pengendalian persenjataan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun memasuki pertengahan tahun 2014, muncul permasalahan dimana Amerika Serikat menyatakan Rusia telah melakukan pelanggaran terhadap INF Treaty. Untuk itu, Marie Harf, juru bicara dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan wakil Rusia melakukan pembicaraan tentang kepatuhan terhadap INF Treaty pada September 2014 tetapi tidak mencapai kata sepakat. Pada Oktober 2018, Presiden Donald Trump menyatakan niatnya untuk mundur dari INF Treaty dan pada 1 Februari 2019 tidak akan melaksanakan kewajiban dalam traktat dimulai pada 2 Februari 2019. Selain itu Amerika Serikat juga mengumumkan akan mundur dari traktat dalam kurun waktu 6 bulan yang kemudian direalisasikan pada 2 Agustus 2019 melalui pernyataan *Secretary of State*, Michael R. Pompeo (United State Departement of State, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Amerika Serikat beberapa kali membuat kebijakan mundur dari perjanjian persenjataan termasuk INF Treaty. Dalam penelitian Habib Akbar yang berjudul *Latar Belakang Mundurnya Amerika Serikat dari Traktat Anti Rudal Balistik (Anti Ballistic Missile Treaty)* Tahun 2001 dijelaskan bahwa ABM Treaty merupakan perjanjian antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang ditandatangani pada Mei 1972 dimana setelah runtuhnya Uni Soviet perjanjian dilanjutkan oleh Rusia. Ketentuan dalam perjanjian itu melarang kedua negara membangun pangkalan rudal balistik berteknologi tinggi, melarang penyebaran rudal keluar wilayah yang menjadi fokus keamanan nasional serta melarang penggunaan sistem radar untuk mengoperasikan rudal berjenis *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM). Perjanjian tersebut memperbolehkan kepemilikan rudal ICBM secara terbatas sebanyak 100 rudal untuk masing-masing negara.

Habib Akbar menjelaskan bahwa keputusan Amerika Serikat mundur dari ABM Treaty dipengaruhi oleh dua faktor, internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup penguatan kebijakan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat pada 1983 dengan mengeluarkan *Strategic Defense Initiative* (SDI) yang bertujuan untuk melindungi wilayah Amerika Serikat dan sekutunya dari serangan rudal ICBM Uni Soviet; perkembangan kebijakan pasca perang dingin yaitu *Global Protection Against Limited Strike* (GPALS) sebagai reorientasi dari SDI. GPALS dirancang untuk mengantisipasi serangan dari *rogue states* dan aktor non-negara seperti teroris; pergantian GPALS menjadi *Ballistic Missiles Program Organization* (BMDO) dengan menyebarkan *National Missiles Defense* (NMD) ketika

masa pemerintahan Bill Clinton untuk menghadapi serangan dari negara-negara lain termasuk *rogue states*. Namun penyebaran NMD di wilayah Amerika Serikat salah satunya ke daerah Grand Forks dan North Dakota yang merupakan wilayah kesepakatan AMB Treaty menyebabkan negara tersebut melanggar ABM Treaty.

Sementara faktor eksternal yang melatarbelakangi mundurnya Amerika Serikat dari ABM Treaty yaitu kemunculan negara-negara produsen rudal balistik pasca perang dingin. Klasifikasi pertama yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat yaitu negara-negara yang termasuk dalam *State of Moderate Proliferation Risk* yaitu India, Pakistan dan Syria. Hal tersebut dikarenakan India merupakan negara yang tidak menandatangani *Non-Proliferation Treaty* (NPT). Syria merupakan negara yang berhasil melakukan uji coba rudal berjenis *Medium-Range Ballistic Missiles* (MRBM) sedangkan Pakistan adalah negara yang mendapatkan bantuan rudal balistik dari Tiongkok dan Korea Utara. Klasifikasi negara yang juga dianggap mengancam Amerika Serikat yaitu *three hard cases* (Iran, Korea Utara dan Irak). Iran adalah negara dengan tingkat kapabilitas rudal balistik yang tinggi dengan menggunakan teknologi Tiongkok dan Rusia. Korea Utara sebagai negara eksportir perlengkapan rudal balistik dan ahli rudal balistik ke negara lain serta menjadi negara yang memiliki ICBM sedangkan Irak merupakan negara dengan produktifitas rudal balistik yang tinggi (Habib Akbar, 2014).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Marga Retha Yuliani dengan judul Analisis Realisme Ofesif Amerika Serikat Keluar dari *Intermediate Range Nuclear Forces Treaty* tahun 2019.

INF Treaty merupakan perjanjian kontrol senjata nuklir pada masa Perang

Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang kemudian dilanjutkan oleh Rusia, perjanjian tersebut ditanda-tangani pada 8 Desember 1987. Perjanjian tersebut mengatur pelarang kepemilikan, pengembangan dan uji coba rudal balistik dengan jarak 500 hingga 5.500 kilometer yang diluncurkan dari darat. Keluarnya Amerika Serikat dari INF Treaty berdasarkan teori realisme ofensif dikarenakan adanya rasa terancam Amerika Serikat oleh pengembangan misil Rusia yang menggunakan teknologi hypersonic delivery system yang memiliki kecepatan tinggi serta kemampuan terbang rendah yang tidak terbaca oleh radar Amerika Serikat. Lebih lanjut, faktor lainnya yaitu adanya kecurigaan Amerika Serikat terhadap kapabilitas militer negara-negara lain yang tidak menjadi pihak terikat dalam INF Treaty, sehingga Amerika Serikat sebagai aktor yang rasional memilih untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Tujuan utama keluarnya Amerika Serikat dari INF Treaty yaitu untuk mengejar hegemoni (Marga Rettha, 2020)

METODE RISET

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menjelaskan alasan mundurnya Amerika Serikat dari INF Treaty pada tahun 2019. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, skripsi artikel dan berita-berita yang berasal dari media elektronik. Untuk teknik analisis penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan secara sistematis terhadap dokumen dan sumber-sumber data internet terkait alasan mundurnya Amerika Serikat dari INF Treaty.

KERANGKA TEORITIS

Dalam melakukan analisis terhadap alasan mundurnya Amerika Serikat dari INF

Treaty, penulis menggunakan teori *Decision Making Process*.

Politik internasional merupakan sejumlah aktifitas dan diklasifikasikan ke dalam tiga jenis pengambilan keputusan yaitu keputusan yang bersifat umum melalui kebijakan atau tindakan langsung, keputusan yang bersifat administratif yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang bersifat krisis yang terbentuk berdasarkan kondisi mendesak yang melibatkan pejabat tinggi dan pejabat rendah.

Tindakan politik luar negeri merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan politik luar negeri, tiga pertimbangan tersebut yaitu (Coplin, 2003):

a. Politik Dalam Negeri.

Politik dalam negeri sebuah negara memiliki dampak yang besar terhadap politik luar negerinya. Dalam politik dalam negeri terdapat sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*) yaitu hubungan timbal balik antara pengambil keputusan luar negeri dengan aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi perilaku politik luar negeri. Terdapat empat kategori tipe *policy influencers*. Pertama, tipe *bureaucratic influencers* yaitu individu atau organisasi yang berada di Lembaga eksekutif pemerintah yang membantu pengambil kebijakan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. Kedua, tipe *partisan influencers* yang bertujuan menerjemahkan tuntutan di masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan kepada para pembuat keputusan. Tipe *influencers* ini lebih berfokus pada pembentukan kebijakan dalam negeri, namun juga berusaha untuk mempengaruhi politik luar negeri jika kebijakan tersebut menyangkut percabangan urusan dalam negeri yang kritis. Ketiga, *interest influencers* merupakan sekelompok

orang dengan kepentingan yang sama namun belum cukup luas untuk menjadi suatu partai. Kepentingan dari *influencers* ini lebih bersifat ekonomis. Keempat, tipe *mass influencers* yang mengacu kepada opini dari komunitas yang dipertimbangan oleh para pengambil keputusan ketika menyusun politik luar negeri.

b. Kondisi Ekonomi dan Militer

Dalam proses pengambilan keputusan luar negeri, perlu bagi para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dan militer negaranya, hal tersebut dikarenakan aspek ekonomi dan militer merupakan kekuatan dari sebuah negara. Terdapat dua dimensi ekonomi yang relevan dengan penyusunan politik dalam negeri yaitu *Gross National Product* (GNP) dan ketergantungan ekonomi terhadap perdagangan internasional dan finansial internasional. Sedangkan dalam dimensi militer terdapat tiga aspek utama untuk mengukur kekuatan atau kelemahan militer suatu negara yaitu kapasitas penggunaan kekuatan militer, tingkat ketergantungan negara dengan sumber luar negeri dan ketidakstabilan internal yang mempengaruhi kemampuan militer.

c. Konteks Internasional.

Terdapat tiga elemen dalam konteks internasional yang mempengaruhi politik luar negeri. Pertama geografis suatu negara yang berkaitan perilaku negara, kedekatan geografis dalam hubungan dagang antar negara dan pemberian suara dalam organisasi. Kedua, hubungan ekonomi yang berkaitan dengan ketergantungan negara-negara satu dengan lainnya. Ketiga, hubungan politik dengan negara lain mempengaruhi keputusan luar negeri suatu negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomea Proliferasi Nuklir

Proliferasi senjata nuklir berawal dari perlombaan persenjataan nuklir antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet selama masa Perang Dingin. Perlombaan persenjataan antara kedua negara tersebut memicu adanya proliferasi senjata nuklir secara vertikal dan horizontal. Proliferasi secara vertikal terjadi ketika negara yang telah memiliki persenjataan nuklir melakukan meningkatkan pembaharuan serta meningkatkan jumlah persenjataan nuklirnya. Pada masa Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan proliferasi secara vertikal yang mana setelah kepemilikan bom atom Amerika Serikat pada 1945 dan Uni Soviet pada 1948 (CTBO, 2022), kedua negara tersebut pembaharuan dengan mengembangkan bom termonuklir atau bom hidrogen pada 1951 untuk Amerika Serikat dan tahun 1953 (Atomic Heritage, 2022). Lebih lanjut, Uni Soviet meningkatkan persenjataan nuklirnya dengan melakukan pengembangan terhadap *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) dengan sebutan R-7 Semyorka pada 20 Mei 1954 dan mulai beroperasi pada 20 Januari 1960.

Akibat dari pengembangan dan peningkatan senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet memicu terjadinya proliferasi secara horizontal di mana negara yang sebelumnya tidak memiliki persenjataan nuklir kemudian mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri ataupun memperoleh persenjataan nuklirnya melalui perdagangan, bantuan negara lain ataupun kerjasama. Pada masa Perang Dingin II Amerika Serikat bekerjasama dengan Inggris dalam hal pengembangan bom atom terlihat dari banyaknya ilmuwan Inggris yang ikut terlibat

dalam Proyek Manhattan. Namun kerjasama tersebut berakhir ketika disahkannya *McMahon Act* pada tahun 1946 yang mana dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa Amerika Serikat tidak akan membagikan informasi terkait senjata atom. Hal tersebut memunculkan kekecewaan dari pihak Inggris sehingga Inggris memutuskan untuk melakukan pengembangan senjata nuklir secara mandiri. Inggris menjadi negara ketiga yang melakukan uji coba senjata nuklir dengan perangkat *Hurricane* pada 3 Oktober 1952 (History Today, 2022). Menyusul Inggris, Prancis menjadi negara keempat yang melakukan pengembangan senjata nuklir yang diuji coba pada 13 Oktober 1960. Lebih lanjut Tiongkok menjadi negara kelima yang melakukan pengembangan senjata nuklir. Pada awalnya Tiongkok mendapatkan dukungan dari Uni Soviet, namun karena renggangnya hubungan kedua negara tersebut Tiongkok memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir secara mandiri yang diuji coba pada 16 Oktober 1964. Negara keenam yang mempunyai persenjataan nuklir pada masa Perang Dingin adalah India, uji coba perangkat nuklir India dilakukan pada 18 Mei 1974 (Atomic Archive, 2022).

Upaya Pengendalian Senjata Nuklir

Akibat dari terjadinya proliferasi senjata nuklir maka dibentuklah rezim non proliferasi nuklir yang bertujuan mencegah penyebaran serta mengendalikan penggunaan senjata nuklir seperti dengan dibentuknya perjanjian bilateral maupun multilateral dan organisasi internasional. Rezim tersebut berfungsi untuk membuat kewajiban proliferasi yang mengikat secara hukum, verifikasi perjanjian dengan adanya kontrol akses terhadap bahan serta teknologi yang digunakan pada senjata nuklir. Terdapat beberapa rezim nonproliferasi yang dibentuk

pada masa Perang Dingin seperti *Limited Test Ban Treaty* (LTBT), *The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) *Strategic Arms Limitations Talks* (SALT) 1 yang menghasilkan *Anti-Ballistic Missiles Treaty* (ABM Treaty), *Strategic Arms Reduction Talks* (START) dan perjanjian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *Intermediate-range Nuclear Forces Treaty* (INF Treaty).

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF Treaty)

INF Treaty merupakan perjanjian antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang ditanda-tangani oleh kedua negara tersebut pada 8 Desember 1987. Peraturan dalam INF Treaty yaitu larangan terhadap pengembangan, kepemilikan dan uji coba rudal balistik jarak pendek dan menengah dengan jangkauan 500–5.500 yang berada di darat. Dalam pelaksanaan INF Treaty, terdapat 17 pasal dan dua protokol yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yaitu protokol inspeksi dan eliminasi. Ketika dilakukannya inspeksi Amerika Serikat memeriksa sebanyak 5.439 rudal milik Uni Soviet yang berada pada 130 situs dan fasilitas rudal. Di pihak lain, tim inspeksi Uni Soviet harus memeriksa sebanyak 2.332 rudal dan 289 peluncur yang berlokasi di 31 situs dan fasilitas rudal Amerika Serikat. Pada tahapan eliminasi kedua pihak harus melakukan eliminasi terhadap rudal jarak pendek dan menengahnya paling cepat dalam waktu 18 bulan dan paling lambat selama 3 tahun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Amerika Serikat mengeliminasi sebanyak 846 rudal balistik yang dilakukan di empat lokasi dan Uni Soviet sebanyak 1.846 rudal balistik yang dilakukan di delapan lokasi. Ketika berakhirnya proses eliminasi, Amerika Serikat dan Uni Soviet mematuhi aturan perjanjian yang berlaku dalam batas

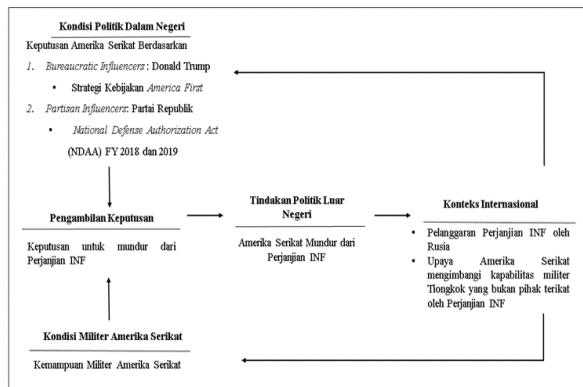
waktu yang tidak ditentukan. Setelah runtuhnya Uni Soviet kewajiban perjanjian diteruskan oleh enam negara pecahan Uni Soviet yaitu Rusia, Kazakhstan, Belarus, Ukraina, Uzbekistan dan Turkmenistan (Harahan, 1993).

Lebih lanjut, proses pengawasan eliminasi berakhir pada 31 Mei 2001 dan kemudian dibentuk *Special Verification Commission* (SVC) sebagai pelaksanaan perjanjian terkait kepatuhan dan implementasi perjanjian. Rusia, Kazakhstan, Belarus, Ukraina dan Amerika Serikat menjadi peserta aktif INF Treaty dan SVC. Sedangkan Turkmenistan dan Uzbekistan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam SVC (Guillot, 2019). Pelaksanaan perjanjian ketika memasuki tahun 2000an tidak berjalan dengan semestinya sehingga pada tahun 2004 Amerika Serikat dan Rusia melakukan pembicaraan terkait pemberlakuan perjanjian secara universal yang kemudian ide tersebut disampaikan pada 25 Oktober 2007 dalam sesi ke-62 Majelis Umum PBB. Namun ide pemberlakuan INF Treaty secara universal mendapatkan penolakan dari negara-negara lain (Brookings Edu, 2014). Lebih lanjut akibat dari adanya kendala dalam pelaksanaan INF Treaty maka Amerika Serikat menyatakan keluar dari perjanjian pada 2 Agustus 2019.

Alasan Mundurnya Amerika Serikat dari INF Treaty

Mundurnya Amerika Serikat dari INF Treaty yang dilakukan pada tahun 2019 dipengaruhi oleh tiga pertimbangan yang menjadi acuan diambilnya keputusan tersebut yaitu adanya pengaruh eksekutif yang mendapat dukungan dari mayoritas kongres, kondisi militer serta adanya kondisi internasional yang sedang dihadapi oleh Amerika Serikat.

Gambar 1. Alur Berpikir Berdasarkan Teori DMP



Sumber: diolah oleh penulis

1. Kondisi Politik Dalam Negeri Amerika Serikat

a. *Bureaucratic Influencer*: Donald Trump sebagai Presiden

Tindakan aktor politik dalam negeri dalam hal ini Presiden Amerika Serikat dapat mempengaruhi keputusan mundurnya negara tersebut dari INF *Treaty*. Donald J. Trump merupakan presiden terpilih ke-45 Amerika Serikat yang tidak memiliki latar belakang politik maupun militer. Berdasarkan penelitian kepribadian yang dilakukan oleh *Unit for the Study of Personality Politics*, kepribadian Trump dicirikan sebagai high-dominance charismatic. Dengan kepercayaan yang tinggi, tipe kepribadian tersebut cenderung mengejar tujuan dibandingkan membangun hubungan dengan negara lain dan memiliki sifat yang kompetitif (Immelman dan Griebie, 2020). Donald Trump dengan posisinya sebagai Presiden memiliki kekuasaan untuk menandatangani undang—undang serta dapat melakukan veto terhadap rancangan undang-undang. Juga, Trump sebagai presiden dapat mengeluarkan *executive orders* yang merupakan deklarasi presiden dengan kekuatan hukum tanpa membutuhkan tindakan dari kongres. Terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan, Presiden memiliki pengaruh yang besar

karena berperan sebagai kepala diplomat yang memiliki kekuasaan untuk membuat perjanjian internasional yang kemudian akan disetujui oleh kongres. Presiden juga memegang posisi sebagai panglima angkatan bersenjata sehingga dapat memutuskan perang. Oleh karena itu, Trump sebagai presiden memiliki kekuatan eksekutif tertinggi untuk mengambil suatu keputusan.

Sejak kampanye kepresidenan pada tahun 2016, Trump menggunakan slogan *Make America Great Again* (MAGA) dengan strategi kebijakan *America First*. Strategi kebijakan *America First* tersebut digunakan sebagai landasan Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat sejak Trump menjabat pada tahun 2017 (National Security Strategy of United States, 2017). Strategi kebijakan tersebut didasarkan kepada prinsip kepentingan Amerika Serikat yaotu kekuasaan, kesejahteraan dan perdamaian. Pada masa kampanye juga, Trump memperlihatkan kertetarikan yang tinggi terhadap persenjataan nuklir dan secara konsisten menyerukan adanya modernisasi senjata nuklir Amerika Serikat (NBC, 2017). Pada 27 Januari 2017 Trump mengeluarkan *executive orders* dengan tujuan meminta Menteri Pertahanan untuk menyiapkan *Nuclear Posture Review* (NPR) yang merupakan dokumen pemerintah terkait kebijakan senjata nuklir, setiap masa pemerintahan akan mengeluarkan NPR masing-masing untuk lima hingga sepuluh tahun. NPR 2018 masa kepemimpinan Trump meneruskan NPR dari kepemimpinan sebelumnya namun terdapat perbedaan terkait jumlah dan komposisi senjata nuklir. Dalam dokumen tersebut diperkenalkan dua senjata berdaya ledak lebih rendah sebagai respon atas memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok (U.S Department of Defense, 2018). Lebih lanjut pada *National*

Defense Strategy (NDS) 2018 Trump menekankan pada pentingnya wilayah Eropa dan Asia-Pasifik dan akan fokus bersaing dengan Rusia dan Tiongkok.

Pada masa pemerintahan Trump dengan acuan strategi kebijakan *America First*, Amerika Serikat telah mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial seperti penarikan diri dari kesepakatan atau perjanjian internasional salah satunya adalah INF *Treaty*. Keputusan tersebut dikarenakan keterikatan serta berlakunya hukum dalam perjanjian dapat menjadi penghalang untuk pencapaian kepentingan nasional dalam hal keamanan negaranya. Pada 1 Februari 2019 Amerika Serikat mengeluarkan pengumuman penangguhan kewajiban INF *Treaty* melalui *press release* yang disampaikan oleh *Secretary of State* Mike Pompeo. Pengumuman tersebut memunculkan respon yang berbeda dari anggota kongres Amerika Serikat. Respon ketidaksetujuan disampaikan oleh anggota kongres yang berasal dari partai Demokrat. Sedangkan respon dukungan disampaikan oleh anggota partai Republik.

b. Partisan Influencers: Dominasi Partai Republik dalam kongres

Pada periode kongres ke-115 (2017–2019) dari 435 kursi pada *House of Representatives* (HOR) partai Republik menempati sebanyak 241 kursi dan partai Demokrat sebanyak 194 kursi (U.S House of Representatives, 2022). Sedangkan untuk Senat dari 100 kursi, partai Republik menempati sebanyak 51 kursi, partai Demokrat 47 kursi dan 2 kursi dari pihak independent (U.S Senate, 2022). Adanya dominasi partai Republik dalam kongres Amerika Serikat serta pandangan partai Republik yang bersifat militeristik dan nasionalistik terhadap keputusan luar negeri, partai Republik memiliki pengaruh terhadap

keputusan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Ketika masa pemerintahan Barack Obama pada tahun 2013, Howard Philip McKeon dari partai Republik menuliskan surat sebanyak dua kali kepada Obama untuk mengukapkan keprihatinannya terhadap pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Rusia. Respon pemerintahan menyatakan bahwa telah melakukan perundingan dengan Rusia. Juga, pihak Obama menyatakan akan menveto *National Defense Authorization Act* (NDAA) tahun fiskal 2013 jika mendesak pemerintahannya untuk membuat keputusan terkait pelanggaran perjanjian oleh Rusia. Kemudian pada tahun 2014 partai Republik di HOR dan Senat mengeluarkan *identical resolutions* yang mendesak Obama untuk meminta pertanggungjawaban Rusia akibat pelanggaran INF *Treaty* (Arms Control, 2019).

Pada tahun 2017 ketika masa pemerintahan Trump *Arms Services Committee Chair* Mac Thornberry dari partai Republik mengajukan RUU untuk NDAA tahun fiskal 2018. RUU tersebut berisi antara lain memberikan wewenang kepada *Department of Defense* dan *Department of Energy* untuk melakukan pengadaan, penelitian, pengembangan serta pengujian terhadap senjata militer terbaru. RUU tersebut lolos dari hasil pemungutan suara 344 berbanding 81 suara pada HOR dan lolos pada 89 berbanding 8 suara di Senat (AIP, 2018). NDAA tahun fiskal 2018 ditanda-tangani Presiden pada 12 Desember 2017, undang-undang tersebut merancang dana yang digunakan untuk Department of Defense sebesar 626 miliar dolar dan 66 miliar dolar untuk biaya operasional lainnya (United States Department of Defense, 2017). Tujuan dari NDAA 2018 untuk meningkatkan kekuatan militer Amerika Serikat. Pada

section 1243 NDAA 2018 tertulis jika Rusia terus melanggar INF Treaty maka Amerika Serikat akan melakukan penelitian, pengembangan serta uji coba rudal berbasis di darat yang digunakan sebagai penangkal bagi rudal Rusia (United States Congress, 2017).

Lebih lanjut pada NDAA tahun fiskal 2019 untuk menindak lanjuti pelanggaran INF Treaty yang dilakukan oleh Rusia, pada section 1243 sebagai tindak lanjut pelanggaran Rusia tertulis Presiden Amerika Serikat selambat-lambatnya hingga 15 Januari 2019 harus menetapkan dan menyampaikan kepada kongres apakah Rusia melakukan pelanggaran marterial terhadap perjanjian atau tidak (United States Congress, 2018). Kemudian, Six monthths notice yang dilakukan Amerika Serikat pada 2 Februari 2019 dengan menanggukkan kewajiban INF Treaty merupakan hasil dari section 1243 NDAA 2019 yang mana Trump telah menetapkan Rusia telah melanggar INF Treaty.

Kondisi Militer Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara dengan militer yang kuat, dalam hal ketergantungan luar negeri dalam bidang militer yaitu sebagai pemasok persenjataan dan penggunaan wilayah negara aliansi sebagai pangkalan militer. Terdapat empat perusahaan besar dalam bidang militer dan pertahanan yaitu Lockheed Martin, Boeing, Raytheon dan Northrop Grumman. Kemudian terdapat sebanyak 750 situs pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di 80 negara (The Soldier Project, 2022).

Lebih lanjut, kemampuan militer Amerika Serikat dapat dilihat dari persenjataan nuklir yang dimiliki. Amerika Serikat memiliki *Intercontinental Ballistic Missiles* (ICBM) dan *Submarine-Launched Ballistic Missiles* (SLBM) serta pesawat. Persenjataan nuklir Amerika Serikat tersebar

di 24 lokasi di negara bagian Amerika Serikat dan 5 lokasi di Eropa. Amerika Serikat juga menggunakan *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) atau yang dikenal sebagai drone militer yang digunakan untuk melaukan pengintaian dan pengawasan. Drone tersebut juga dapat digunakan untuk mengangkut rudal ataupun bom yang digunakan ketika serangan drone.

Tabel 1. Penggunaan Dana Militer Amerika Serikat

| FY | DoD Base Budget | DoD OCO | Support Base | Support OCO | Total Spending |
|------|-----------------|---------|--------------|-------------|----------------|
| 2003 | \$364.9 | \$72.5 | | | \$437.4 |
| 2004 | \$376.5 | \$91.1 | | | \$467.6 |
| 2005 | \$400.1 | \$78.8 | | | \$478.9 |
| 2006 | \$410.6 | \$124.0 | \$109.7 | | \$644.3 |
| 2007 | \$431.5 | \$169.4 | \$120.6 | | \$721.5 |
| 2008 | \$479.0 | \$186.9 | \$127.0 | | \$792.9 |
| 2009 | \$513.2 | \$153.1 | \$149.4 | | \$815.7 |
| 2010 | \$527.2 | \$163.1 | \$160.3 | \$0.3 | \$851.6 |
| 2011 | \$528.3 | \$158.8 | \$167.4 | \$0.7 | \$855.2 |
| 2012 | \$530.4 | \$115.1 | \$159.3 | \$11.5 | \$816.3 |
| 2013 | \$495.5 | \$82.1 | \$157.8 | \$11.0 | \$746.4 |
| 2014 | \$496.3 | \$85.2 | \$165.4 | \$6.7 | \$753.6 |
| 2015 | \$496.1 | \$64.2 | \$165.6 | \$10.5 | \$736.4 |
| 2016 | \$521.7 | \$58.9 | \$171.9 | \$15.1 | \$767.6 |
| 2017 | \$523.2 | \$82.5 | \$177.1 | \$35.1 | \$818.9 |
| 2018 | \$574.5 | \$88.1 | \$181.8 | \$46.4 | \$890.8 |
| 2019 | \$616.2 | \$68.8 | \$206.4 | \$10.1 | \$904.3 |

Sumber: diolah oleh penulis

Pada masa pemerintahan Donald Trump terjadi peningkatan dana militer yang digunakan untuk melakukan peningkatan keamanan (The Balance, 2022). Peningkatan dana dan penggunaan militer pada masa pemerintahan Trump merupakan realisasi janji kampanye. Pada tahun 2016 ketika masa kampanye, Trump menyatakan jika Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat maka akan meminta kepada kongres untuk meningkatkan dana keperluan militer. Pada tahun 2017 adanya permintaan Trump kepada kongres untuk meningkatkan dana militer menjadi 30 miliar dollar Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2018 Trump meminta kongres untuk meningkatkan dana militer

yang digunakan untuk menghadapi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Peningkatan anggaran serta penggunaan dana militer tersebut didukung kongres dengan dikeluarkannya NDAA untuk tahun fiskal 2018 dan 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan serta memperkuat militer Amerika Serikat untuk menghadapi ISIS dan juga melakukan penelitian rudal darat yang nantinya digunakan sebagai penangkal rudal Rusia. Lebih lanjut keseriusan Amerika Serikat dalam memperkuat militernya terlihat dari proyeksi anggaran sepuluh tahun untuk senjata nuklir yang dilakukan oleh *Congressional Budget Offices*, yang mana terjadi peningkatan proyeksi anggaran dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Kondisi Internasional

a. Pelanggaran INF Treaty oleh Rusia

Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan Kontrol Sejata dan Keamanan Internasional Amerika Serikat, Rose Gottemoeller mengatakan bahwa Rusia telah melakukan pengembangan rudal secara rahasia dan melakukan uji coba terhadap rudal dengan kode SSC-8 atau 9M729 pada tahun 2008. Perangkat 9M729 merupakan rudal berjenis *Ground Launched Cruise Missile* (GLCM) dengan Panjang 6–8 meter dan diameter sebesar 0,514 meter. Rusia menyatakan bahwa jangkauan rudal tersebut hanya sejauh 480 kilometer. Namun menurut laporan *National Air and Space Intelligence Center* (NASIC) Amerika Serikat menyatakan bahwa jangkauan rudal tersebut maksimum mencapai 2.500 kilometer. Kemudian kendaraan yang digunakan untuk mengangkut rudal tersebut dapat menangkut sebanyak empat rudal.

Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat merespon pelanggaran Rusia dengan melakukan negosiasi dengan Rusia

pada Mei 2013 di mana Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran terkait pelanggaran untuk pertama kalinya. Namun, hal tersebut disangkal oleh pihak Rusia. Pada tahun 2014 Amerika Serikat mengumumkan pelanggaran INF Treaty yang dilakukan oleh Rusia secara resmi melalui laporan tahunan *adherence to and compliance with arms control, nonproliferation and disarmament agreements and commitment* yang diterbitkan pada 31 Juli 2014. Pelanggaran Rusia terhadap INF Treaty juga termuat laporan tahunan yang sama pada tahun 2015 hingga tahun 2019 (United States Mission, 2019).

Laporan tahunan kepatuhan Amerika Serikat menyebutkan bahwa telah diadakan sebanyak 6 pertemuan ahli *Special Verification Commission* (SVC) untuk membahas pelanggaran Rusia. Lebih lanjut diadakan pula pertemuan multilateral yang dilakukan oleh NATO dengan Rusia sejak tahun 2014 hingga tahun 2017. Dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan Amerika Serikat telah memberikan informasi yang didapat terkait pelanggaran INF Treaty seperti rudal tersebut berjenis GLCM yang dibuat oleh perusahaan Novator dan Titan dan uji coba rudal tersebut dilakukan di lokasi pengujian Kapustin Yar. Respon Rusia tetap menyangkal bahwa rudal tersebut melanggar dan Rusia meminta Amerika Serikat untuk memberikan lebih banyak bukti.

Tidak adanya kemajuan dalam negosiasi maka pada Oktober 2018 Amerika Serikat menyatakan memiliki keinginan untuk keluar dari perjanjian. Pada 23 Januari 2019 untuk pertama kalinya setelah dilakukan penyangkalan, Rusia memperkenalkan kepada public rudal SSC-8 atau 9M729 dan dioperasikan sebanyak 64 rudal. Kemudian, sebagai tindak lanjut pada 2 Februari 2019 Amerika Serikat meneguhkan kewajibannya dari INF

Treaty. Enam bulan setelahnya pada 2 Agustus 2019 Amerika Serikat secara resmi mundur dari perjanjian tersebut. NATO merespon keputusan Amerika Serikat dengan memberikan dukungan dan mempersiapkan dunia tanpa INF Treaty (Missile Defense Advocacy, 2019).

Mundurinya Amerika Serikat dari INF Treaty tersebut dilakukan berdasarkan pasal XV ayat 2 dari perjanjian tersebut. Pada pasal tersebut berbunyi bahwa pihak dalam perjanjian jika terjadi kejadian luar biasa yang membahayakan kepentingan nasional. Dalam hal ini pelanggaran Rusia dapat membahayakan kepentingan internasional yaitu keamanan negaranya.

Pada Maret 2019 Amerika Serikat mengumumkan akan melakukan uji coba terhadap rudal berjenis IRBM yang merupakan rudal yang dibatasi oleh INF Treaty. Uji coba yang dimaksudkan tersebut dilakukan pada 12 Desember 2019 di Pangkalan Udara Vandenberg, California yang mana dilakukan setelah Amerika Serikat resmi keluar dari INF Treaty. Dalam pengembangan serta uji coba rudal dilakukannya oleh Northrop Grumman Innovation System yang merupakan salah satu dari empat perusahaan terbesar yang dimiliki oleh Amerika Serikat (CNN, 2020).

b. Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok

Selain pelanggaran Rusia terhadap INF Treaty, kondisi internasional lain yang dihadapi oleh Amerika Serikat adalah perkembangan militer Tiongkok. Ketidakterikatan Tiongkok dengan INF Treaty menyebabkan Amerika Serikat kesulitan untuk mengantisipasi peningkatan kapabilitas militer Tiongkok terutama terkait rudal. Diketahui Tiongkok telah melakukan penyebaran terhadap strategi *Anti-Access/Area*

Denial (A2/AD) di wilayah Asia Pasifik (Missiles Defense Advocacy, 2018).

Strategi A2/AD merupakan strategi keamanan dengan menghadang pergerakan musuh menggunakan kombinasi rudal balistik yang diluncurkan dari darat, udara dan laut serta menggunakan pesawat tempur dan kapal perang. Strategi tersebut dapat menghalangi operasi militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. A2/AD milik Tiongkok berada di sekitar wilayah Taiwan dan Laut Cina Selatan sehingga dapat mengancam fasilitas militer Amerika Serikat di Okinawa dan Guam.

Dalam menjalankan strategi A2/AD, Tiongkok menggunakan rudal balistik berjenis jarak pendek dan menengah atau IRBM yang dikenal dengan *Dongfeng Series* atau *DF Series*. Salah satu tipe IRBM dari DF Series ada DF-26 yang memiliki jangkauan sejauh 4000 kilometer. Perangkat tersebut dikembangkan oleh *China Aerospace Science and Technology Corporation (CASTC)* pada tahun 2010. DF-26 diperkenalkan pada parade militer di Beijing pada tahun 2015. Uji coba perangkat tersebut berhasil dilakukan pertama kali pada tahun 2017 (CSIS, 2021).

Perangkat DF-26 dibahas dalam laporan tahunan Amerika Serikat *U.S. China Economic and Security Commission (USCC)* pada 2016. Dalam laporan tersebut kemampuan rudal DF-26 menjadi kekhawatiran bagi Amerika Serikat karena dapat menjangkau Guam sehingga disebut dengan "*Guam Killer*". Guam merupakan pulau yang berada di bagian barat Samudra Pasifik yang memiliki peran penting bagi strategi geopolitik Amerika Serikat untuk melawan pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut. Terdapat dua pangkalan militer utama Amerika Serikat di Guam yaitu Pangkalan Angkatan Udara Anderson dan Pangkalan Angkatan Laut Guam. DF-26 juga berpotensi membatasi mobilitas militer

Amerika Serikat dengan menghalangi pergerakan kapal induk Amerika Serikat (CSIS,2021).

Pada tahun 2018 Tiongkok mengerahkan sebanyak 18 peluncur DF-26 di Xinyang, provinsi Henan. Kemudian pada tahun 2019 dikerahkan sebanyak 12 *Transporter Erector Launchers* (TELS) DF-26 Alxa, Mongolia. Pada tahun 2019 telah dikerahkan sebanyak 200 peluncur DF-26 (CSIS, 2021). Keberadaan penyebaran IRBM DF-26 tersebut mengancam daerah territorial serta pangkalan Amerika Serikat yang berada di Guam. Karena adanya keterikatan Amerika Serikat dengan INF Treaty dengan larangan kepemilikan IRBM menyebabkan kurangnya kemampuan Amerika Serikat untuk mengimbangi kemampuan militer Tiongkok. Sehingga hal tersebut menjadi factor pertimbangan bagi mundurnya Amerika Serikat dari INF *Treaty*.

Lebih lanjut penyebaran IRBM Tiongkok tidak hanya memicu mundurnya Amerika Serikat dari INF *Treaty* namun juga perkembangan IRBM di wilayah Asia. Pada tahun 2017 Korea Utara melakukan uji coba terhadap IRBM dengan kode Hwasong-12. Kemudian uji luncur perangkat tersebut dilakukan pada 28 Agustus 2017 yang diluncurkan dari Pyongyang dan terbang melintas di atas pulau Hokkaido, Jepang. Uji coba perangkat Hwasong-12 kembali dilakukan pada 15 September 2017 yang dan 3 Oktober 2022 (CSIS, 2022).

Setelah keluarnya Amerika Serikat dari INF *Treaty* dan sebagai respon atas meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok yang memicu peyebaran rudal IRBM di wilayah Asia, pada 1 Oktober 2020 Amerika Serikat mengaktifkan kembali *Marine Corps Base Camp Blaz* (MCB *Camp Blaz*) yang berlokasi di Dedodo barat laut Guam. Pengaktifkan MCB Camp Blaz menggunakan

dana sebesar \$1.5 miliar. Pangkalan militer tersebut merupakan kontrak antara Amerika Serikat dan Jepang yang mana Jepang membayar \$3 miliar untuk biaya pembangunan (Stripes.com, 2020). Lebih lanjut, Amerika Serikat juga berencana untuk menempatkan rudal IRBM yang sebelumnya diuji coba pada Desember 2019 di Guam yang digunakan sebagai rudal penangkal dari rudal lawan.

KESIMPULAN

INF Treaty merupakan perjanjian kontrol senjata yang ditanda-tangani oleh Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Setelah berakhirnya Perang Dingin, perjanjian tersebut dilanjutkan oleh Amerika Serikat dengan negara negara pecahan Uni Soviet salah satunya adalah Rusia. Dari perjanjian tersebut telah Amerika Serikat dan Uni Soviet telah berhasil melakukan eliminasi terhadap IRBM mereka. Namun pada tahun 2000an pelaksanaan INF Treaty tidak berjalan dengan semestinya dipengaruhi adanya faktor perubahan kondisi internasional dengan berkembangnya negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir khususnya dengan jenis IRBM. Pada tahun 2014 Amerika Serikat menyatakan Rusia telah melanggar INF Treaty dan pada 2 Agustus 2019 Amerika Serikat resmi meninggalkan perjanjian tersebut. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut yaitu faktor internal dan eksternal.

Dalam faktor internal yaitu kondisi dalam negeri Amerika Serikat, penelitian ini menemukan tiga hal yang menjadi pertimbangan mengapa keputusan tersebut diambil. Pertama, adanya pengaruh dari Donald Trump sebagai Presiden dengan strategi kebijakan *America First* yang menekankan pada pencapaian kepentingan nasional. Lebih jauh, dalam menghadapi

permasalahan terkait INF Treaty, Trump menekankan kepada peningkatan kemampuan militer. Kedua, adanya dominasi partai Republik di kongres Amerika Serikat mendukung keinginan Trump untuk meningkatkan kemampuan militer Amerika Serikat dengan dikeluarkannya NDAA tahun fiskal 2018 dan 2019 yang mengatur dana untuk melakukan research serta pengembangan terhadap rudal baru yang akan digunakan untuk menangkal rudal Rusia. Ketiga, dengan menjabatnya Trump sebagai presiden serta adanya NDAA yang mengatur dana untuk penelitian rudal baru terjadi peningkatan dana serta pengeluaran militer Amerika Serikat. Keseriusan Amerika Serikat dalam peningkatan pertahanan dengan nuklir juga terlihat dari meningkatnya proyeksi anggaran terkait nuklir yang dilakukan oleh CBO.

Sedangkan pada faktor eksternal terkait situasi yang dihadapi oleh Amerika Serikat yaitu adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Rusia dengan dilakukannya pengembangan dan uji coba rudal SSC-8 atau 9M729 yang merupakan jenis rudal GLCM yang dilarang dalam INF Treaty. Merespon hal tersebut sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 Amerika Serikat pelanggaran Rusia dituliskan dalam laporan kepatuhan tahunan. Amerika Serikat telah melakukan negosiasi dengan pihak Rusia namun hasil dari negosiasi-negosiasi tersebut berakhir dengan penyangkalan. Kondisi selanjutnya adalah peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dengan adanya penyebaran strategi A2/AD yang menggunakan rudal IRBM yang dapat mengancam pangkalan militer Amerika Serikat di Guam.

Berdasarkan dua faktor yang telah dijelaskan di atas, faktor eksternal merupakan faktor terkuat yang menjadi alasan pengunduran diri Amerika Serikat dari

perjanjian tersebut. faktor eksternal memicu adanya tindakan-tindakan dalam faktor internal yang memicu diambilnya keputusan untuk mundur dari INF Treaty.

REFERENSI

- AIP, *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018 - H.R.2810 / S.1519*. Tersedia di <https://www.aip.org/fyi/federal-science-billtracker/115th/national-defense-authorization-act-fiscal-year-2018>
- Alex Wilson, *Contracts for Marines Corps' new base on Guam are nearing \$1.5 billion*. Dipublikasikan pada 19 Agustus 2021. Tersedia di https://www.stripes.com/threaters/asia_pacific/2022-04-20/marine-corps-basecamp-blaz-guamconstruction-okinawa-5742392.html
- Atomic Archive, *History of the Atomic Age*, tersedia di https://www.atomicarchive.com/history_index.html
- Atomic Heritage, *Hydrogen Bomb – 1950*, tersedia di <https://www.atomicheritage.org/history/hydrogen-bomb-1950>
- Bohlen, Burns, Piter, and Woodworth, 2012, *The Treaty On Intermediate-Range Nuclear Forces: History and Lesson Learned*, Foreign Policy of Brookings, Washington D.C
- CNN, *U.S tests missile previously banned under the arms control treaty with Russia*. Dipublikasikan pada 12 Desember 2019. Tersedia di <https://www.cnn.com/2019/12/12/politics/pentagon-missile-test/index.html>.
- Coplin, William D.. 2003. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*.

- Terjemahan Drs. Marsedes Marbun, Penerbit SINAR BARU. Bandung
- CSIS Missile Threat, *Hwasong-12* (KN-17). Dipublikasikan pada 20 Mei 2022. Tersedia di <https://missilethreat.csis.org/missile/hwasong-12/>
- CSIS Missile Defense Project, *Missile of China*. Dipublikasikan pada 12 April 2021. Tersedia di <https://missilethreat.csis.org/country/china/>
- CSIS Missile Threat, SS-20 “Saber” (RSD-10), Tersedia di <https://missilethreat.csis.org/missile/ss-20-saber-rsd-10/>
- CTBTO, 29 August 1949 – First Soviet Nuclear Test, Tersedia di <https://www.ctbto.org/specials/testing-times/29-august-1949-first-soviet-nuclear-test>
- Department of Defense, *Trump Signs Fiscal Year 2018 Defense Authorization*. Dipublikasikan pada 12 Desember 2017. Tersedia di <https://www.defense.gov/News/NewsStories/Article/Article/1394990/trump-signs-fiscal-year-2018-defenseauthorization/>
- History Today, First British Atomic Bomb Test, Tersedia di <https://www.historytoday.com/archive/months-past/first-british-atomic-bomb-test>
- Immelman & Griebie, *The Personality Profile and Leadership Style of U.S. President Donald J. Trump in Office*, 2020, Berlin, Unit for the Study of Personality in Politics
- Jeffrey D. McCausland, 1983, *The SS-20: A Range of Choices*, U.S Naval War College Press, Newport
- Joseph P. Harahan, 1993, *On-Site Inspections Under The INF Treaty*, Library of Congress Cataloging-in-Publishing Data
- Michael Guillot, 2019, *Strategic Studies Quarterly* Vol.13 No.2, Air University Press
- Nuclear Forces Guide, RT-21 M / SS-20 Saber, Tersedia di <https://fas.org/nuke/guide/russia/theater/er-21m.html>
- State.Gov, *The Elimination Of Their Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles (INF Treaty)*, Tersedia di <https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/102360.htm>
- The Balance, *U.S. Military Budget, Its Components, Challenges, and Growth*. Dipublikasikan pada 3 Februari 2022. Tersedia di <https://www.thebalance.com/u-s-military-budget-components-challengesgrowth-3306320>
- United States Department of Defense, *Nuclear Posture Review*, 2018